

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN EKONOMI MELALUI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Maya Nurhayati^{1*}, Endi Rustandi², Ali Priyono³, Indrayogi⁴, Salsabya Dwi Majwa⁵

¹Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

⁴Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

⁵Program Studi Pendidikan Jasmani, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

*e-mail korespondensi: mayanurhayati@unma.ac.id

Abstract

To prevent the next generation from engaging in radicalism, drugs, or promiscuity, the development of sports facilities and infrastructure is necessary. It is also important to inform the public about the risks associated with hypokinetics, or lack of movement. In addition, there are three commercial options for Village-Owned Enterprises (BUMDes) for those who build sports facilities in their environment: infrastructure, institutional or organizational, and coaching. The BUMDes within the Cikoneng Village Government does not capitalize on the business opportunities that arise from these three factors to generate additional business results; it only handles franchise payments for grocery businesses and PAM water and electricity bills. This actually has no significant impact in driving economic development in the neighborhood when the benefits are taken into account. People can easily pay monthly fees from other applications without going through additional service providers due to the sophistication of modern technology. The expected results in this PKM can help the future village government as a pilot village in building the community's economy through sports facilities by first coordinating with partners, description of problems and solutions, material assistance, and evaluation.

Keywords: Village Government; Economic Development; Sports Infrastructure Facilities

Abstrak

Untuk mencegah generasi penerus terlibat radikalisme, narkoba, atau pergaulan bebas, pembangunan sarana dan prasarana olahraga sangat diperlukan. Penting juga untuk memberi tahu publik tentang risiko yang terkait dengan hipokinetik, atau kurang bergerak. Selain itu, ada tiga pilihan komersial Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi mereka yang membangun fasilitas olahraga di lingkungannya: infrastruktur, kelembagaan atau organisasi, dan pembinaan. BUMDes di lingkungan Pemerintah Desa Cikoneng tidak memanfaatkan peluang usaha yang muncul dari ketiga faktor tersebut untuk menghasilkan tambahan hasil usaha; Pengelola BUMDes hanya menangani pembayaran waralaba untuk usaha penyedia sembako dan tagihan air dan listrik PAM. Ini sebenarnya tidak berdampak signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi di lingkungan sekitar ketika manfaatnya diperhitungkan. Orang dapat dengan mudah membayar biaya bulanan dari aplikasi lain tanpa melalui penyedia layanan tambahan karena kecanggihan teknologi modern. Hasil yang diharapkan dalam PKM ini dapat membantu pemerintah desa kedepan sebagai desa percontohan dalam membangun ekonomi masyarakat melalui fasilitas olahraga dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan mitra, deskripsi masalah dan solusi, bantuan materi, dan evaluasi.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa; Pembangunan Ekonomi; Sarana Prasarana Olahraga

Accepted: 2024-01-10

Published: 2024-04-30

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan di perdesaan hingga saat ini masih belum terselesaikan. Sejak tahun 2000, proporsi kemiskinan perdesaan rata-rata selalu lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan (Ranadhani et al., 2021). Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin perdesaan mencapai 13,2%, sedangkan perkotaan hanya 7,9%. Oleh karena itu, upaya penyetaraan pembangunan ekonomi perdesaan dan perkotaan sangat penting, di mana diharapkan adanya peranan penting dari penyaluran dana desa dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Sutrisna, 2020). Dalam hal ini, pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan

mengelontorkan dana desa dalam jumlah besar. Pada tahun 2018, pemerintah pusat menganggarkan dana desa sebesar Rp 60 triliun. Angka ini meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun pada tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi Rp72 triliun pada tahun 2021. "Hasil penelitian kami di LPEM tahun 2020, tahun lalu, yang mencoba melihat data cahaya dari matahari dan menghitung lampu-lampu di desa menunjukkan bahwa dana desa merupakan bagian penting dari proses pemulihan ekonomi nasional di masa krisis COVID-19 ini," ujar (Dartanto 2021).

Sejalan dengan kondisi sosial ekonomi di Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka yang akan menjadi mitra PKM ini, masih perlu peningkatan dan penguatan terkait sosial ekonomi, berdasarkan data yang ada 40 % berpenghasilan tetap tiap bulannya dan 60 % buruh serabutan. Jika dilihat dari kondisi profil Desa pada gambar diatas wilayah Desa Cikoneng sangat strategis, fasilitas umum mudah dijangkau seharusnya tingkat perekonomian lebih mandiri. Berdasarkan pengamatan dan wawancara salah satu perangkat desa di dapati bahwa kebanyakan masyarakat masih tergantung sama buruh tani sebesar 50% yang mempunyai usaha 20%, 30% buruh pabrik. Jika dilihat dari strategis wilayah tersebut seharusnya banyak beberapa usaha yang bias berkembang disana. Terkait sarana dan prasarana umum juga masih minim dilihat dari Fasilitas olahraga hanya ada lapang bola voli outdoor yang kini kegunaanya berubah menjadi lahan parkir, lapang sepak bola yang berubah menjadi kebun bersama warga. Motivasi untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan cenderung rendah, sehingga penguatan sosial ekonomi juga ikut tidak stabil karena minimnya kreatifitas dari warga.

Penghasilan Asli Desa (PADes) didapat tidak mempunyai tambahan lain melainkan hanya mengelola sawah bengkok yang disewakan pemerintah desa kepada masyarakat. Jika dirata-ratakan PADes sangat sedikit dan tidak bisa berkembang. Adanya BUMDes juga tidak membantu memperkuat perekonomian apalagi untuk meningkatkan sangatlah susah. Tidak ada pengembangan ide kreatif usaha padahal support dana dari Dana Desa cukup mudah didapat jika pengelola kreatif dan inovatif. Merujuk pada itu trend bisnis BUMdes kini bias diarahkan pada pengerjaan Fasilitas Olahraga (Sujana, 2018). Dana Desa dipastikan bisa dipergunakan untuk pembangunan sarana olahraga, selain untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanganan COVID-19, dan peningkatan perekonomian di desa (Senjani, 2019).

Solusi Permasalahan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian perdesaan di Indonesia karena BUMDes mempunyai kekuatan utama, yaitu dimiliki oleh pemerintah desa dengan landasan musyawarah desa, berbeda dengan koperasi yang dimiliki oleh anggotanya atau UMKM yang dimiliki perorangan atau sekelompok orang (Sanjaya et al., 2020). Meskipun begitu, dari sekitar 75 ribu desa di Indonesia, hanya sekitar 45 ribu desa yang memiliki BUMDes. 15 ribu diantaranya yang telah mendaftar ke Kemendes, tetapi yang usahanya berjalan tidak sampai 5 ribu. Artinya, peran BUMDes hingga saat ini belum optimal dalam upaya membangun perekonomian Indonesia "Sehingga diperlukan ide kreatif untuk mengembangkan usaha BUMDes. Bisnis BUMDes idealnya tidak bersaing dengan warga desa. Namun sebaliknya, bisnis BUMDes harus memperkuat ekosistem bisnis dan menciptakan usaha-usaha baru yang bisa mendorong perputaran ekonomi di desa (Engkus et al., 2021).

Dalam kaitannya dengan olahraga, peneliti coba menyandingkan dengan beberapa program BUMDes dalam membangun bisnis melalui pengelolaan sarana dan Prasarana olahraga, pembangunan sarana olahraga ini pernah menjadi salah satu dari empat program prioritas Kemendes PDTT pada tahun 2019 (Jauhariyah et al., 2021). Tujuannya membangun ruang publik dan meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat. pembangunan sarana olah raga di desa merupakan hal penting karena menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan energinya secara positif, agar tidak terjebak pada narkoba, tawuran dan radikalisme (Wahyudi, 2018).

Pembangunan fasilitas ini punya tiga aspek peluang bisnis untuk BUMDes yaitu Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Kelembagaan /Organisasi dan Aspek Pembinaan (Sudiana, 2018).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan di dapat dari 13 Desa yang berda di lingkungan Kecamatan Sukahaji Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang peningkatannya masih terbilang lambat yakni dianatranya Desa Cikoneng. Permasalahan yang ada pada Desa Cikoneng ini peneliti menjadikan sebagai mitra dari kegiatan pengabdian ini karena alasan pembahasan diatas, didapati BUMDes yang ada hanya bergerak dalam bidang penyedia sembako ketika pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta loket pembayaran iuran listrik, token dan air PAM. Pengelola BUMDes yang bernama Asep mengatakan "pendapatan belum bias menutupi biaya oprasional, masih sangat sedikit warga yang menggunakan jasa pembayaraan iuran bulanan". Terkait hal itu banyak hambatan yang ditemui dari pengelolaan BUMDes baik alasan internal maupun eksternal dimasyarakat.

Desa Cikoneng merupakan Desa yang berada dekat dengan fasilitas umum yang ada di wilayah kecamatan Sukahaji, secara sosial kehidupan masyarakat disana seharusnya lebih matang dan maju dibandingkan desa lain karena berada diwilayah perkotaan. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dilihat dari perekonomian juga Pendapatan Asli Desa (PADes) Paling sedikit dibandingkan Desa lain, hanya mengandalkan sebidang tanah bengkok berupa sawah yang di kelola pemerintah disewakan kepada para petani. Seperti yang sudah dijelaskan di analisis situasi diatas, BUMDes tidak hanya mengelola terkait sandang, pangan dan papan saja. Akan tetapi fasilitas umum seperti mengelola sarana dan prasarana olahraga sangat memungkinkan di Desa Cikoneng karena letak wilayah sangat strategis bias menjangkau kegiatan sosial lainnya.

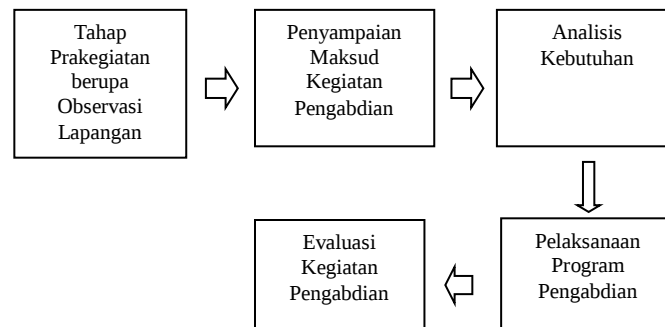
Pembangunan fasilitas olahraga punya tiga aspek peluang bisnis untuk BUM Des yaitu Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Kelembagaan /Organisasi dan Aspek Pembinaan (Marlina et al., 2021). Adanya sarana prasarana olahraga juga diyakini dapat memberikan peluang bisnis bagi BUMDes, dengan mengelola lapangan untuk disewakan ke masyarakat umum. Dalam hal ini, BUMDes akan menyediakan perlengkapan olahraga seperti kostum sepak bola, Bola Voli, Sepatu, perlengkapan latihan dan lainnya. Serta mendirikan unit usaha baru, kios kuliner atau makanan ringan di sekitar lapangan. BUMDes juga akan memiliki peluang bisnis pada bidang kelembagaan, dengan mengadakan berbagai event olahraga di wilayah kecamatan hingga kabupaten. Dengan demikian ekonomi Desa akan berkembang karena melibatkan banyak masyarakat dari luar Desa juga (Gunawan et al., 2021)

METODE

Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi melalui sarana dan prasarana olahraga. Adapun tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pelaksanaan
 - a. Survey Kebutuhan
Analisis dilakukan dengan survey dan wawancara terlebih dahulu kepada beberapa perangkat Desa dan tokoh masyarakat Desa Cikoneng.
 - b. Persiapan Alat yang akan digunakan
 - c. Merancang materi dan kuisisioner tingkat kepuasan kegiatan

2. Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan

3. Partisipasi Mitra Dalam Kegiatan PKM

Pemerintahan Desa Cikoneng mengundang lembaga Desa dan tokoh masyarakat serta beberapa instansi yang terkait untuk mengikuti kegiatan.

4. Kepakaran dan Pembagian Tugas Tim PKM

Tim PKM membagi tugas masing-masing instruktur sesuai keahlian masing yang dimiliki, yaitu:

- Keahlian dalam bidang pengelolaan dan pemasaran, simulasi dan perancangan ide usaha dilakukan dalam kegiatan yakni tenaga ahli sport marketing.
- Aspek kebutuhan pasar dalam pembinaan olahraga dilakukan oleh pendamping ahli sport marketing.
- Mahasiswa membantun menyiapkan presentasi kegiatan dan pembagian kuisisioner tingkat kepuasan.

Seluruh Tim mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah melakukan wawancara dan observasi dilapangan terkait sarana dan prasarana yang ada di Desa Cikoneng, di dapati kurang layak sarana dan prasarana olahraga. Maka dari itu kami membuat kegiatan dan bekerja sama dengan tenaga ahli sport marketing yang memberikan materi mengenai:

- Perancangan ide usaha menggunakan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Desa. Dengan menggunakan anggaran dana Desa yang diperuntukan membangun infrastruktur
- Pengelola di serahkan kepada BUMDes dalam mengelola sarana dan prasarana olahraga beserta pemasarannya
- Bantuan pihak tenaga ahli dalam mendesain lapangan dan gedung serba guna layak sesuai dengan aturan dan ukuran lapangan pertandingan resmi
- Pemerintah Desa Cikoneng berkeinginan membuat Gor/gedung serba guna bukan hanya untuk sarana dan prasarana olahraga saja akan tetapi bisa digunakan rapat pertemuan dan acara-acara lain.

Setelah kegiatan selesai mahasiswa membangikan kuisisioner mengenai tingkat kepuasan peserta kegiatan dalam mengikuti kegiatan ini guna mengevaluasi hasil kegiatan, di dapati hasil dari kuisisioner ini yakni:

- Mengenai waktu pelaksanaan dari 50 peserta menjawab sangat sesuai sebesar 100%
- Mengenai kesesuaian tema dengan materi menjawab sangat sesuai 85% dan sisa nya 15% mengatakan sesuai
- Materi dari Narasumber 1). Materi *sport marketing* sebesar 70% sesuai, 20% sangat sesuai dan 10 % tidak sesuai

4. Materi dari Narasumber 2). Materi Pembinaan Olahraga Masyarakat sebesar 75 % sesuai, 15 tidak sesuai dan 10 % sangat sesuai
5. Penyampaian Moderator sebesar 100% sesuai
6. Kebermanfaatan kegiatan sebesar 85 % sesuai dan 20% tidak sesuai
7. Keseluruhan acara dalam kegiatan 100% dinilai sesuai
8. Ketertarikan peserta dalam kegiatan selanjutnya dengan tema dan topik berbeda 80% tertarik dan 20% kurang tertarik.

Evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan diharapkan stimulus dan respon lebih menarik serta waktu yang dibutuhkan harus lebih banyak, namun kami lebih mengefisienkan waktu, tenaga dengan materi yang ada.

Pembahasan

Dalam prioritas penggunaan dana desa merupakan pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun selalu ada acuan regulasi (Permendes) tersendiri (Engkus et al., 2021).

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 diatur melalui Pemendes, PDTT dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2017, sesuai pasal 4 dapat diketahui bahwa prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, namun perbedaan yang signifikan adalah pembangunan sarana olahraga desa itu merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama (Bajuri et al., 2018).

Kenapa sarana olahraga? Apa dampak positifnya? Olahraga adalah kegiatan yang sangat efektif meningkatkan mentalitas positif. Olahraga berfungsi refreshing, membangun kedekatan antar warga dan sarana bagi pembangunan masyarakat yang sehat juga mendorong setiap orang untuk berkompetensi dengan cara yang baik (Wahyudi, 2018). Sarana prasarana olahraga desa merupakan ruang publik yang menciptakan keramaian, generasi muda dapat menyalurkan aktivitas positif agar terhindar dari narkoba, premanisme dan radikalisme. Dengan berkumpulnya masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa dan memacu pertumbuhan ekonomi desa (Sujana, 2018).

Strategi Pendampingan dalam Mewujudkan Sarana Prasarana Olahraga

Strategi pendampingan untuk fasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana olahraga desa adalah:

- Peningkatan kapasitas para Pendamping Profesional agar memiliki kemampuan dalam fasilitasi desa melakukan identifikasi sarana prasarana olahraga desa, perencanaan dan pelaksanaan embung, serta pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana olahraga desa agar berkelanjutan;
- Mendorong desa agar memasukan dalam RPJM Desa dan menjadi kegiatan prioritas dalam APBDesa;
- Fasilitasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah agar memberikan dukungan kepada desa terkait dengan pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana olahraga desa;
- Fasilitasi pengelolaan, pengembangan dan pemasaran oleh BUMDesa.

Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga Desa

Pembangunan sarana prasarana olahraga desa dimanfaatkan terutama untuk kegiatan keolahragaan masyarakat desa, selain itu juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya seperti Festival Desa, layar Desa dan lainnya (Bajuri et al., 2018). Diharapkan untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana prasarana olahraga desa dapat dikelola dan dikembangkan sebagai unit usaha BUMDesa.

Untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana, upaya pemerintah diberikan pembinaan sesuai dengan tingkat dan keahlian masing-masing bidangnya, pemberian penataran khusus bagi perangkat-perangkat kabupaten maupun kota serta provinsi dalam peningkatan hasilnya belum dapat diandalkan (Afandi, 2013). Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya perangkat pemerintah desa yang melakukan berbagai pelanggaran seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya pengabdian dalam melaksanakan pembangunan tugas sehari-hari, rendahnya tingkat keahlian dan ketrampilan yang ada pada upaya pemerintah desa, penempatan personil yang kurang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, kemudian ditambah lagi tingkat dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai (Syuhada et al., 2021).

Dari pelaksanaan pembangunan diatas, ada juga masalah yang harus dihadapi oleh upaya pemerintah yaitu masalah sikap mental yang lemah dalam mengambil keputusan (Rivai & Wahyuni, 2021). Dalam pelaksanaan pembangunan di desa maka upaya pemerintah di tuntut memiliki kemampuan yang mampu menjaring semua data (masukan) dari masyarakat agar data alternative tersebut bisa menjadi data yang relevan, mampu memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan serta menilai hasil yang diperoleh demi kemajuan daerah/desa tersebut, tugas yang emban dalam wilayah desa cukup rumit sehingga butuh pemecahan masalah agar semua bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat (Jauhariyah et al., 2021).

Selain itu tugas pemerintah penyelenggaraan pemerintah juga bergantung pada bidang pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan (Afandi, 2013). Serta tugas-tugas administratif. Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas di desa dalam pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan upaya pemerintah dalam hal ini tergantung pada kepala desa dan bawahannya (Gunawan et al., 2021). Karena tanpa kerjasama antar kepala desa dan bawahannya dalam pelaksanaan tugas akan mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa (Arafi & Surya, 2022). Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki kemampuan yang tepat, cerdas, praktis dan rasional dalam pengambilan keputusan (Dharmawan et al., 2018).

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh kepala desa sebagai pengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diembankan, pendelegasian tugas berdasarkan struktur organisasi yang ada didesa seperti pendelegasian tugas kepada sekretaris desa, kepala jaga dan mewartu, kepala urusan (kaur) yakni kepala urusan pemerintah, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum (Sutrisna, 2020). Jadi, upaya kepala desa sangatlah penting dalam proses pengambilan keputusan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (Sudiana, 2018).

Kinerja upaya pemerintah di desa ditentukan oleh pendayagunaan upaya pemerintah dalam hal ini pendayagunaan seorang pemimpin dalam proses pengambilan keputusan seperti meningkatkan kualitas upaya pemerintah, dedikasi dan ketrampilan seperti meningkatkan pendayagunaan para bawahan yang ada (Riyoko et al., 2017). Oleh karena itu, dalam usaha menciptakan upaya Pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas dengan baik, sehingga semangat pengabdian yang tanpa pamrih pemerintah sangat diharapkan (Hutchinson et al., 2018).

Namun semuanya tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh upaya pemerintah itu sendiri karena merekalah yang menentukan sikap dan perilakunya masing-masing (Hatuwe et al., 2021). Usaha/Upaya pemerintah memotivasi masyarakat untuk melaksanakan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dapat ditarik kesimpulan dari paparan seorang informan mengatakan belum cukup baik. Karena pemerintah kurang bergerak cepat untuk membuka

wawasan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan sarana prasarana (Gunawan et al., 2021).

Selanjutnya upaya-upaya di lakukan pemerintah dalam menganjak masyarakat menjaga hasil pembangunan sarana prasarana dapat dilihat dari partisipatif seorang aparat/kaur dan masyarakat. Dimana kepala desa yang mempunyai dua tugas yaitu sebagai abdi negara yakni harus bermental baik dan mempunyai kemampuan profesional tinggi dan penuh bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung kelancaran tugas pembangunan sarana prasarana (Riyoko et al., 2017). Dan sebagai abdi masyarakat yakni harus melayani, mengayomi, dan menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Upaya/usaha memang sering mengalami hambatan dari upaya pemerintah desa itu (Heryani, n.d.). Apabila kurang cerdas dalam mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan akan menimbulkan pembangunan sarana prasarana yang tidak baik, makanya untuk itu di butuhkan upaya pemerintah yakni bermental baik, yang mempunyai kemampuan profesional tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mendukung kelancaran tugas pembangunan (Natal, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat kami simpulkan yaitu sarana dan prasarana olahraga di desa sangatlah dibutuhkan karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi. Oleh karena itu, peranan pemerintah desa begitu penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2013). *Articipatory Action Research (Par) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif*. Workshop Pengabdian Berbasis Riset Di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 53(9), 1689–1699.
- Arafi, A. Al, & Surya, I. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 394–403.
- Bajuri, F. A., Hidayatullah, M. F., Kristiyanto, A., Keolahragaan, I., & Maret, U. S. (2018). Pemanfaatan Fasilitas Ruang Terbuka / Publik Sebagai Prasarana Olahraga. *Jurnal Nasional IPTEK Olahraga*, 1–3.
- Dharmawan, D. B., Ichsandi, R., & Faza, R. U. (2018). Ruang terbuka olahraga di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang: Kajian analisis melalui sport development index. *Jurnal Keolahragaan*, 6(1), 11–19. <https://doi.org/10.21831/jk.v6i1.14650>
- Engkus, E., Suparman, N., & Sakti, F. T. (2021). MODEL TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LUMBUNGSARI KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 441. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28062>
- Gunawan, A., Mahendra, I. R., & Hidayat, A. (2021). *Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Management of Sports Facilities and Infrastructure*. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 1–11.
- Hatuwe, R. S. M., Tuasalamony, K., Susiati, S., Masniati, A., & Yusuf, S. (2021). Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Desa Namlea Kabupaten Buru. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 87.
- Heryani, R. D. (n.d.). PERAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN. 198–212.
- Hutchinson, M., Berg, B. K., & Kellison, T. B. (2018). Political activity in escalation of commitment: Sport facility funding and government decision making in the United States. *Sport Management Review*, 21(3), 263–278. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.07.005>
- Jauhariyah, N. A., Soekardjo, S., & Hariyono, P. (2021). Pengabdian dalam Upaya Pencapaian Kondisi Permukiman, Sarana, dan Prasarana Sehat Dalam Mewujudkan Kabupaten

- Banyuwangi Sehat di Tahun 2021. *LOYALITAS, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 105. <https://doi.org/10.30739/loyal.v4i1.920>
- Kit, V., Leung, T., Sik, S., Suen, H., Sahota, D. S., Lau, T. K., & Leung, T. Y. (2012). External cephalic version does not increase the risk of intra-uterine death: a 17-year experience and literature review. 25(9), 1774–1778. <https://doi.org/10.3109/14767058.2012.663828>
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- Natal, Y. R. (2020). Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Pendidikan Di Smp Negeri Se-Kecamatan Bajawa. *IMEDTECH (Instructional Media, Design and Technology)*, 4(1), 22. <https://doi.org/10.38048/imedtech.v4i1.222>
- Ranadhani, A., Kumenaung, A. G., & Tolosang, K. D. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(02), 228–239.
- Rivai, A., & Wahyuni, A. (2021). Herbal Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya. 6788.
- Riyoko, E., Soegiyanto, & Sulaiman. (2017). Kebijakan Pemerintah, Minat Masyarakat untuk Berolahraga. 1–12.
- Sanjaya, P. K. A., Hartati, N. P. S., & Premayani, N. W. W. (2020). "Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdikari Melalui Implementasi Digital Marketing System." *Carrade: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 65–75. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde%0Ahttps://doi.org/10.31960/caradde.v3i2.467>
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen pada BUMDES dalam the Role of Management System in Bumdes in Increasing the Real Income of the Village. *Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAD*, 2(1), 23–40.
- Sudiana, I. K. (2018). Dampak Olahraga Wisata Bagi Masyarakat. *Journal IKA*, 16(1), 55–66.
- Sujana, D. (2018). Dampak Simultan Manajemen Sarana Prasarana dan Peran Kepemimpinan Terhadap Pembangunan Olah Raga. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(1), 116–132. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.142>
- Sutrisna, I. W. (2020). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(2), 8–15. <https://doi.org/10.47532/jic.v3i2.195>
- Syuhada, F. A., Pulungan, A. N., Sutiani, A., Nasution, H. I., Sihombing, J. L., & Herlinawati, H. (2021). Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam Pengolahan Air Bersih di Desa Sukajadi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) TABIKPUN*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.23960/jpkmt.v2i1.23>
- Wahyudi, N. A. (2018). Peran perkembangan industri olahraga dan rekreasi dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda. *Prosiding SNIKU (Seminar Nasional Ilmu Keolahragaan UNIPMA)*, 1(1), 34–42.